



## **TESIS**

### **Judul:**

Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Harta  
BersamaTanpa Adanya Persetujuan Salah Satu  
Pihak (Putusan Pengadilan Negeri Bandung  
Nomor 530/PDT.G/2017/PN.BDG)

### **Disusun oleh:**

ZSA ZSA ADIPUTRI  
NIM. 217202028

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022

**PEMBATALAN AKTA HIBAH BERDASARKAN  
HARTA BERSAMA TANPA ADANYA PERSETUJUAN  
SALAH SATU PIHAK (PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI BANDUNG NOMOR  
530/PDT.G/2017/PN.BDG)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Zsa Zsa Adiputri

N.I.M : 217202028

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2022**

## Persetujuan

Nama : ZSA ZSA ADIPUTRI  
NIM : 217202028  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul : Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Harta Bersama  
Tanpa Adanya Persetujuan Salah Satu Pihak (Putusan  
Pengadilan Negeri Bandung Nomor  
530/PDT.G/2017/PN.BDG)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-Juni-2022

Pembimbing:  
TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.  
NIK/NIP: 10215010



---

## Pengesahan

Nama : ZSA ZSA ADIPUTRI  
NIM : 217202028  
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN  
Judul Tesis : Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Harta Bersama  
Tanpa Adanya Persetujuan Salah Satu Pihak (Putusan  
Pengadilan Negeri Bandung Nomor  
530/PDT.G/2017/PN.BDG)  
Title : -

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Juli-2022.

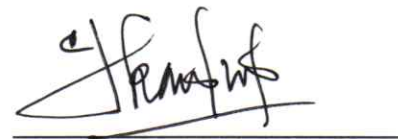
### Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

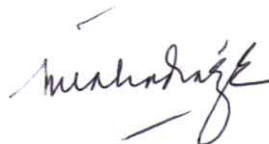
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

### Pembimbing:

TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.  
NIK/NIP: 10215010



Jakarta, 22-Juli-2022  
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya yang melimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan ujian akhir semester guna memenuhi syarat penilaian yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan.

Penulis menyadari bahwa laporan tesis ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, nasehat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.M selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Prof. Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn,. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran kepada Penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada Penulis, serta kepada para staff yang telah memberikan bantuan dalam urusan administrasi maupun teknis.

6. Keluarga inti yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis.
7. Sahabat-sahabat kuliah Penulis yang sudah menemani dan memberikan dukungan serta motivasi dari awal perkuliahan hingga penulisan tesis ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dalam penyusunannya dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Jakarta, 15 Juni 2022

Penulis,

Zsa Zsa Adiputri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	30
B. Pengertian Tentang Hibah.....	39
C. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta.....	6

D. Konsekuensi Yuridis Dalam Hal Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum.....	74
E. Pengertian Perlindungan Hukum .....	81

### **BAB III DATA HASIL PENELITIAN**

A. Hasil Penelitian Putusan Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg.....	86
B. Hasil Wawancara Dengan Dosen Hukum Perdata.....	102
C. Hasil Wawancara Dengan Notaris dan PPAT.....	105

### **BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN**

A. Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Terkait Pembuatan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Persetujuan Salah Satu Pihak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg.....	115
B. Analisis Tentang Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terkait Pembatalan Akta Hibah Atas Harta Bersama Tanpa Adanya Persetujuan Salah Satu Pihak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 530/Pdt.G/2017/PN.Bdg.....	129

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	152

### **DAFTAR PUSTAKA**



## ABSTRAK

Zsa Zsa Adiputri (217202028)

### **PEMBATALAN AKTA HIBAH BERDASARKAN HARTA BERSAMA TANPA ADANYA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 530/PDT.G/2017/PN.BDG)**

(v + 151 halaman)

Penyusunan tesis ini membahas mengenai tindakan yang menyalahi aturan hukum dalam akta hibah, yang mana pemberian hibah tersebut dilakukan dengan memakai harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari salah satu pasangan hidupnya. Seperti diketahui apabila terdapat dari satu pihak saja, baik itu dari pihak suami atau dari pihak istri ingin melaksanakan tindakan secara hukum dengan menggunakan harta atas milik bersama, maka wajib adanya persetujuan dari pasangan hidupnya tersebut. Hal ini berdasarkan pada Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut menerapkan peraturan terkait urusan harta atas milik bersama. Namun pada kenyataannya, ditemukan adanya pemberian hibah yang diberikan untuk orang lain dengan memakai harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pasangan hidup. Sebagai contoh penulis mengangkat masalah dalam tesis ini mengenai pemberian hibah dengan memakai harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pasangan hidupnya merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 530/PDT.G/2017/PN.BDG. Penelitian yang diangkat mengusung metode studi pustaka, serta menerapkan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian diungkapkan bahwa pemenuhan adanya tindakan menyalahi aturan hukum yang oleh pihak Tergugat I serta Tergugat II mengenai pengeluaran akta hibah atas harta milik bersama yang beralih kepemilikan untuk pihak lain diluar pengetahuan serta kesepakatan pihak lain yang tidak dibenarkan. PPAT dinilai lalai dalam memangku otoritasnya serta PPAT dapat diberikan sanksi dengan alasan akta hibah yang seharusnya mempunyai wewenang secara hukum yang paripurna dianggap batala atas nama hukum merujuk dari putusan pihak pengadilan yang mempunyai wewenang hukum secara tetap.

***Kata Kunci : PPAT, Hibah, Harta Bersama.***

## **ABSTRACT**

Zsa Zsa Adiputri (217202028)

### **ILLEGAL ACTIONS OF GRANT CERTIFICATE OF PROPERTY WITH WITHOUT THE CONSENT OF OTHER PARTIES (CASE STUDY DECISION NUMBER 530 / PDT.G / 2017 / PN.BDG)**

(v + 151 pages)

In the writing of the thesis will be discussed about committed an illegal action legal cancellation grant certificate on the estate together without approval. Transitional was triggered because wealth together in of marriage by a grant has to do with the agreement of both sides. This is because pursuant to article 36 verse ( 1 ) the legislation number 1 in 1974 about the marriages Is about wealth with , husband or wife can act with the agreement of both sides . But in fact still often found negligence and the principle of prudence that in so deed the law, particularly in Grant certificate causes loss for one of his side. In this research the use writers the methodology literature and used the legislation. The Research, Concluded that the fulfillment element legal actions conducted by defendant I and defendant II Related certificate grant of property joint be transferred to another party without the consent of other parties is not correct because PPAT are not the principle of prudence in running his position and PPAT . Civil may be penalized because the deed grants that supposed to have legal force that is perfect to be a deed which only have legal force under the arms, Or declared void and / or null or void Based on the decision of which the court has already having the force of law.

***Keywords : PPAT , grant , with wealth.***